

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan :

1. Perbandingan penerapan SMKK pada proyek pembangunan Gedung Kantor Bappeda dan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD di kabupaten Sijunjung adalah bahwa penerapan SMKK memakai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2019 lebih maksimal dibanding tahun anggaran 2019 yang memakai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5 Tahun 2014.
2. Kelebihan dan kekurangan penerapan SMKK pada proyek pembangunan Gedung Kantor Bappeda dan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD di kabupaten Sijunjung adalah: pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2019 lebih gampang mengontrol atau mengevaluasi SMKK dilapangan sedangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 5 Tahun 2014 K3 tidak diuraikan di RAB sehingga tidak mudah dalam mengevaluasinya.
3. Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada proyek pembangunan gedung di Kabupaten Sijunjung adalah: Perlu ditingkatkan budaya dan kedulian dari pekerja konstruksi akan pentingnya pemakaian APD

dilapangan; Selalu memberikan sosialisasi kepada pekerja secara rutin tentang pentingnya pemakaian APD saat bekerja; Petugas K3 yang ada dilapangan harus sesuai dengan yang ada di dokumen penawaran sehingga yang ada dilapangan benar-benar yang berkompetensi dan berpengalaman; Kemampuan petugas K3 perlu ditingkatkan dilapangan; Perlu adanya pelatihan dan pembinaan untuk petugas K3; Untuk pelatihan agar lebih detail dalam penyampaianya; Perlu diperkuat lagi sanksi yang diberikan kepada penyedia jasa yang tidak menerapkan SMKK karena pada saat ini hanya berlaku sanksi administrasi, berharap kedepannya diberlakukan sanksi yang lebih berat lagi seperti sanksi blacklist untuk perusahaan yang tidak menerapkan SMKK dilapangan; Adanya evaluasi secara rutin penerapan K3 dilapangan oleh konsultan pengawas ataupun owner.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini berharap dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar lebih aktif memberikan bimtek dan sosialisasi untuk penerapan SMKK dilingkungan proyek konstruksi.
2. Penelitian ini berharap dapat menjadi masukan untuk penyedia jasa lebih bisa membudayakan pekerja dilapangan untuk memakai APD selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

3. Bisa jadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya agar lebih bisa mengembangkan lagi lebih detail dari penelitian sekarang dan meneliti peraturan SMKK yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Awuy, Tanya. (2017). Faktor – Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 Pada Proyek Konstruksi Di Kota Manado. Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Sipil Statik* Vol.5 No.4 Juni 2017 (187-194) ISSN: 2337-6732.
- Creswell, John W. (2012). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ILO, 2013 *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja Sarana untuk Produktivitas*. Jakarta: SCORE
- Kamdhari, E., & Estralita, D. (2018). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek FEMALE APARTMENT ADHIGRYA PANGESTU. Jurusan teknik sipil politeknik negeri jakarta. *Politeknologi* Vol.17 No.1
- Kementerian PUPR. (2019). Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Jakarta.
- Kementerian PUPR. (2020). Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Jakarta.
- Kamdhari, E., & Estralita, D. (2018). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek FEMALE APARTMENT

ADHIGRYA PANGESTU. Jurusan teknik sipil politeknik negeri jakarta.
Politeknologi Vol.17 No.1

Kementerian PUPR. (2014). Permen PUPR No. 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta.

Kementerian PUPR. (2016). Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta.

Kementerian PUPR. (2018). Permen PUPR No. 2/PRT/M/2018 tentang perubahan atas Permen PUPR No. 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta.

Kementerian PUPR. (2019). Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Jakarta.

Kementerian PUPR. (2020). Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Jakarta.

Masjuli, (2018), “Akselerasi Sosialisasi ISO 45001:2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja”, Jurnal Migasian Vol 2, No.2, Desember 2018.

Masjuli, Handayani H, and Suminto, (2017), “Antisipasi Industri Dalam Merespon Publikasi ISO 45001 Tahun 2018”, Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health Vol. 1, No. 2, April 2017.

Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- OHSAS 18001. (2007). Occupational Health and Safety Management System - Requirements.
- OHSAS 18002. (2008). Occupational Health and Safety Management Systems Guidelines for the Implementation of OHSAS 18001:2007.
- Organisation Internationale de Normalisation (ISO), (2018),“Occupational Health & Safety ISO 45001:2018”, Diunduh dari <https://www.iso.org>
- Project Management Institute . (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Vol. 6th Edition. USA.
- Republik Indonesia. (1970). Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.. Jakarta
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta
- Republik Indonesia. (2017). Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta
- Republik Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2002 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta
- Republik Indonesia. (2002). Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi. Jakarta
- Republik Indonesia. (2002). Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta
- Rinaldi Ricky & Mardiman. (2020). Analisis Kriteria Pemilihan Pemenang Tender Kontaktor Konstruksi di DKI Jakarta. Jurnal Teknik Sipil Universitas Teuku Umar, Jakarta

- Syaiful. 2021. Kajian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan (Smk3) Konstruksi Di Era Covid-19. Vol 5 No 3, September 2021
- Syam, Anjas asmoro. 2017. Studi Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Proyek Bandar Udara Rendani Manokwari. Gowa: Universitas Hasanudin
- Subagyo, A., Tri. L. Dan Arief S. (2015). Pengenalan Rumus Bangun Ruang Berbasis Augmented Reality. No. ISBN: 978-602-1180-21-1
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfa Beta, Bandung.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Warawu, Saloni. 2016. Analisis Faktor Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Yang Signifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Apartement Student Castle. Spektrum Industri, 2016, Vol. 14, No. 1, 1 – 108
- Wartuny, William Ridson. 2018. Model Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001:2015 Pada Kontraktor Di Propinsi Papua Barat. Jurnal Sipil Statik Vol.6 No.8 Agustus 2018 (579-588) ISSN: 2337-6732